

Perkuat Ekonomi Kreatif, Kemendagri Dorong NTB Tingkatkan Inovasi Berbasis Riset

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mendorong perangkat daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkatkan inovasi berbasis riset di daerahnya. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat di wilayah tersebut. Pesan itu ditekankan Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntayungo saat Rapat Koordinasi (Rakor) Riset dan Pengembangan Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Aula BRIDA Provinsi NTB pada Senin (13/3). Rakor ini diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB. Dalam arahannya, Yusharto mengatakan, resesi di tingkat global saat ini, banyak mempengaruhi daya beli masyarakat hingga berkurangnya pasar kerja. Kondisi demikian, dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Maka dari itu, Yusharto mendorong pemda terus mengembangkan riset dan inovasi di bidang industri kreatif sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. "Banyak sekali bisnis yang gulung tikar, lalu operasi bisnis yang terhambat, lalu berikutnya yang kita rasakan berkurangnya pasar kerja atau pengurangan karyawan, di balik itu semua pemerintah tetap harus berinovasi," terangya. Sementara itu, berdasarkan data pelaporan Indeks Inovasi Daerah (IID) 2022, nilai Provinsi NTB mengalami penurunan dari berbagai aspek meliputi penurunan skor, ranking, pelaporan jumlah inovasi, hingga banyaknya inovasi yang belum sesuai ketentuan. "Ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar ke depannya setiap perangkat daerah di wilayah Provinsi NTB dapat lebih serius mengembangkan inovasi yang dimilikinya dengan didasarkan pada riset yang dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya. Yusharto juga mengungkapkan, berdasarkan rekapitulasi skor IID Provinsi NTB 2022, menempatkan Lombok Timur pada posisi ketiga setelah Lombok Tengah dan Sumbawa Barat. Kesenjangan tersebut dapat disikapi dengan memperbaiki penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). "Contohnya kesenjangan Lombok dan Sumba yang masih perlu coba kita perbaiki diskrepansi pencapaian hasil pembangunannya, misalnya dengan memperbaiki penyusunan RKPD dengan melibatkan teknokrat," tuturnya. Yusharto mengimbau Provinsi NTB selalu memperhatikan komposisi data yang digunakan saat mengembangkan inovasi

berbasis riset. Dia berharap inovasi yang akan dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui BSKDN sudah melalui serangkaian uji coba. Dengan begitu, inovasi tersebut dapat memiliki nilai kematangan yang cukup. "Agar dalam upaya peningkatannya (Inovasi) semua pihak memperhatikan tingkat kematangannya, dengan begitu tidak ada lagi inovasi yang ditolak (tidak memenuhi syarat) di tahun-tahun berikutnya," pungkasnya.